



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng 92812

Telepon (0414) 22333

Pos el setda@kepulauanseleyarkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3/I/TAHUN 2025/SETDA**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;



- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



MESDIYONO

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3/1/TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM STRUKTURAL ORGANISASI
I	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Drs. MESDIYONO, M. Ec.Dev./19740626 199311 1 002	Pejabat Pembuat Komitmen sda
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sda	sda
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	sda	sda
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	sda	sda
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TTTTEN RIANY, S.T., M.T./19730104 200701 2 021	Pejabat Pembuat Komitmen sda
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	sda	sda
7	Penyediaan Paketan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	sda	sda
8	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	sda	sda
9	Penyediaan Dana Penujang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	sda	sda
10	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	sda	sda
11	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	sda	sda
12	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	sda	sda
II	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
	A. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Drs. MESDIYONO, M. Ec.Dev./19740626 199311 1 002	Pejabat Pembuat Komitmen sda
2	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	TTTTEN RIANY, S.T., M.T./19730104 200701 2 021	sda
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	sda	sda
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sda	sda
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	sda	sda
6	Penyediaan Bahan/Material	sda	sda
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	sda	sda
8	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	sda	sda
9	Pengadaan Mebel	sda	sda
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	sda	sda
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sda	sda
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sda	sda
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sda	sda
14	Pemeliharaan Mebel	sda	sda
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	sda	sda
16	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	sda	sda
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	sda	sda



Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 Sertifikasi - Dokumen ini dilandilangari secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
 Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3	4
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sda	sda
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sda	sda
20	Fasilitasi Keprotokolan	sda	sda
21	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	sda	sda
	B. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Drs. MESDIYONO, M. Ec.Dev./19740626 199311 1 002	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	sda	sda
3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	sda	sda
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	sda	sda
	C. BAGIAN ORGANISASI		
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analitis Jabatan	TTTTEN RIANY, S.T., M.T./19730104 200701 2 021	sda
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	sda	sda
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	sda	sda
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	sda	sda
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	sda	sda
	III ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	A. BAGIAN PEMERINTAHAN		
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	sda	sda
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	sda	sda
3	Fasilitasi Otonomi Daerah	sda	sda
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
	B. BAGIAN HUKUM		
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	sda	sda
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	sda	sda
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	sda	sda
	C. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1	Pelaksanaan STQH Tingkat Provinsi	sda	sda
2	Pelaksanaan STQH Tingkat Kabupaten	sda	sda
3	Pelaksanaan Pemberangkatan Jamaah Haji	sda	sda
4	Pelaksanaan Pemulangan Jamaah Haji	sda	sda
5	Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah/Bansos	sda	sda
6	Pengelolaan dan Evaluasi Pendidik Tlawaati Qur'an, Kitab Kuning, Hafidz dan Inan Tetap Mesjid Agung	sda	sda
7	Pelaksanaan Hari-hari Besar Islam	sda	sda
8	Penyaluran Insentif Guru BRTQ	sda	sda
9	Pemberian Santunan Veteran kepada Anggota Veteran dan Onderstand	sda	sda
	IV ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
	A. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	sda	sda
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Pertambangan	sda	sda



NO	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM STRUKTURAL ORGANISASI
1	Lingkungan Hidup	sda	sda
3	Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	sda	sda
4	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	sda	sda
5	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	sda	sda
6	Kordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	sda	sda
1	B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	sda	sda
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	sda	sda
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	sda	sda
1	C. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA		
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	sda	sda
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	sda	sda
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	sda	sda



a. n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,

 Pemerintah Kabupaten
 Kepulauan Selayar
MESDIYONO



Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 Sertifikasi - Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
 Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code